

TAHUN 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2020 – 2024. Rencana Kerja Tahunan memberikan panduan, pedoman bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2024.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 menjabarkan program, output, dan kegiatan-kegiatan prioritas Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan kedepan sangat kami harapkan, juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat disusun.

Jakarta, 6 Januari 2024
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Jakarta

Akhmadon, S.Pi, MM

TU	PP	SP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Sistem Penyajian.....	6
BAB II RENCANA KINERJA 2024.....	8
A. Rencana Kinerja 2024.....	8
B. Program, Kegiatan, Output, dan Rencana Target 2024.....	14
C. Kegiatan Prioritas 2024.....	17
BAB III PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan PSDKP Jakarta telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta tahun 2024 menggambarkan kinerja tahunan yang ingin diwujudkan disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

C. DASAR HUKUM

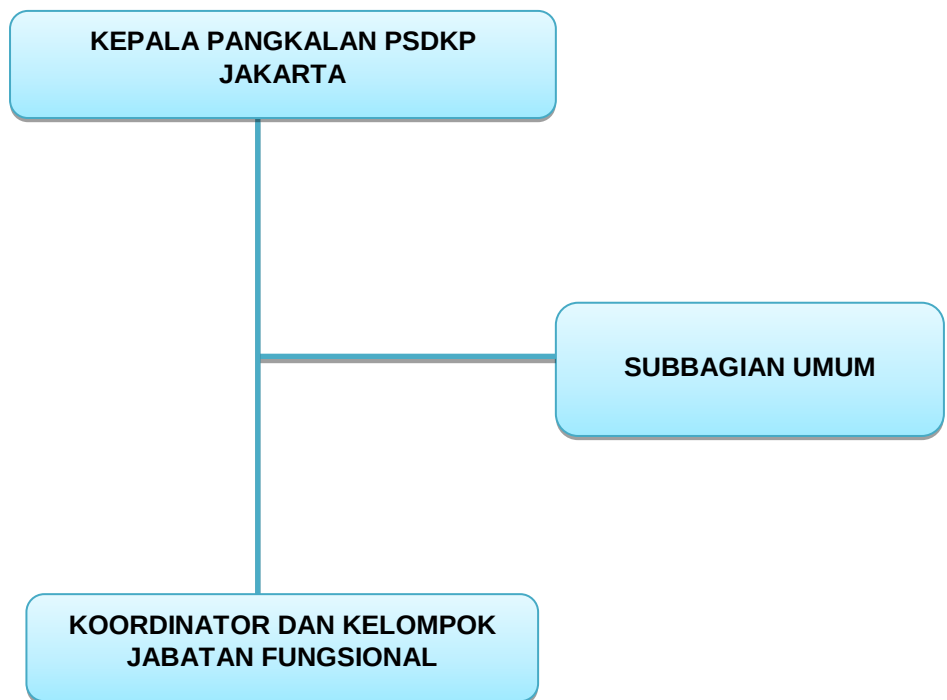
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;



5. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta setingkat Eselon III dan membawahi Sub Koordinator Tata Usaha, Sub Koordinator Sarana dan Prasarana, Sub Koordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta



1. Tugas dan Fungsi

Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas yang diad-hock ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa serta perairan teritorial yang tersebar di Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 (lima) Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas Pesawaran SDKP	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
3	Satwas Pandeglang SDKP	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
4	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan
5	Satwas Sukabumi SDKP	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari Provinsi Lampung sampai Propinsi Jawa Barat. Yang tersebar pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 mencakup Perairan Jawa Barat dan Banten dan WPP 573 mencakup Perairan Samudera Hindia bagian Selatan Jawa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

BAB II

RENCANA KINERJA 2024

A. RENCANA KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		ISK.1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK.1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		ISK.1.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK.2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK.3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK.4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK.4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
		ISK5.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
		ISK5.1.4	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		ISK5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	82
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	84
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		ISK5.1.8	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21
		ISK5.1.9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (inovasi)	1
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK5.1.13	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,76
		ISK5.1.14	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	86



Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Perspektif/sasaran strategis/Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)
SK1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120
SK.1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	100	120
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	98,05	112
IKU 4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100
K.1.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan				
IKU 6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	80	100	120
SK.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan				
IKU 7	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	100	100
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan				
IKU 8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100
SK.3.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan				
IKU 9	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	100	100
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas				
IKU 10	Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
IKU 11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	74,10	92,63
IKU 12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penguasaan Sanksi Administratif (Indeks)	80	100	120
SK.5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
IKU 13	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	87,19	109
IKU 14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	88,61	110,8
IKU 15	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	85,95	114,6
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
IKU 17	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	78	83,17	106,6
IKU 18	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	80,50	79,25	98,45



IKU 19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	120
IKU 20	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21	23,83	113,5
IKU 21	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	2	120
IKU 22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	92	93,33	120
IKU 23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5	100	120
IKU 24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5	93,39	120
IKU 25	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,75	90,71	96,76
IKU 26	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	82	84,82	103,4



Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	14.879.402.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.223.415.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
SK2.2	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2.361.790.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
SK3.2	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif</i>	
SK4.2	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23.074.175.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		43.292.782.000

B. PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RENCANA TARGET 2024

KEGIATAN PENDUKUNG (RO RKAKL)		ANGGARAN (RP. 000)	SATUAN	TARGET
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1.300.000	Kelompok Masyarakat	13
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	8.149.125	Operasi	40
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	1.134.361	Operasi	31



KEGIATAN PENDUKUNG (RO RKAKL)		ANGGARAN	SATUAN	TARGET
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	8.149.125	Operasi	40
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	2.175.676	Unit	2
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	2.120.240	Unit	9
2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	72.000	Lembaga	50
2352.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	20.000	Unit	1
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.900.000	Lembaga	51
2352.QIC.002	Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	100.000	Lembaga	30
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	131.415	Operasi	1
2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	2.300.000	Lembaga	515
2353.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	61.790	Operasi	1
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	626.000	Perkara	20
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	626.000	Perkara	20



KEGIATAN PENDUKUNG (RO RKAKL)		ANGGARAN	SATUAN	TARGET
2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	68.000	Perkara	1
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	90.122	Dokumen	4
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	90.122	Layanan	1
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	41.000	Dokumen	4
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	140.000	Orang	155
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	75.000	Layanan	1
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	75.000	Layanan	1
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	90.122	Layanan	1
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	90.122	Layanan	1
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	25.000	Layanan	1



KEGIATAN PENDUKUNG (RO RKAKL)		ANGGARAN	SATUAN	TARGET
2355.EBA.956	Layanan BMN	18.500	Layanan	1
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.000	Unit	2
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	41.000	Dokumen	2
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	41.000	Dokumen	2

C. ALOKASI ANGGARAN

Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh alokasi anggran tahun 2024 sebesar Rp 43.292.782.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Distribusi Anggran tersebut terbagi menjadi 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	14.879.402.000
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.223.415.000
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2.361.790.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23.074.175.000

D. KEGIATAN PRIORITAS 2023

Berdasarkan rencana kerja (Renja) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023, kegiatan prioritas program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta meliputi:

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
2. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan *Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat*
3. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
4. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
5. *Speed Boat* Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing



D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap
5. Peraturan Perundang – undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)



BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini menjabarkan secara detail dukungan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2024, dan terlebih khusus dukungan terhadap pencapaian target Renstra Ditjen PSDKP 2020 - 2024.

Diharapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen PSDKP tahun 2024.

